

**TESIS**

**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH  
(*ONRECHTSMATIGE OVERHEIDSDAAD*) DALAM KONTEKS  
KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA  
NEGARA**



**OLEH  
ARDOYO WARDHANA, S.H.  
NIM. 031814153088**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah di setujui,

Tanggal, 10 Agustus .2020

Oleh :

Dosen Pembimbing 1:



**Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.**  
NIP. 19500306 198003 2 002

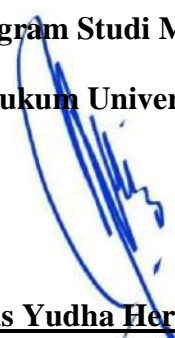
Dosen Pembimbing 2 :



**Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19691225 199512 2 001

Mengetahui :

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.**  
NIP. 196504191990021001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal, 10 Agustus 2020**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Dr. Suparto Wijoyo,S.H.,M.H**

**Anggota : 1.Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S**

**2. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H**

**3. Dr. M Hadi Subhan,S.H.,MH.,C.N**

**4. Dr. Bambang Suheryadi,S.H.,M.Hum**

**PERNYATAAN ORSINILITAS TESIS**

Hari, Tanggal : Senin, 10 Agustus 2020  
Ruang : 108 (Gedung B Fakultas Hukum)  
Pukul : 14.00-15.00Wib  
Nama Mahasiswa : Ardoyo. Wardhana,S.H  
NIM : 031814153088  
Judul Tesis :PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMERINTAH  
(*ONRECHTSMATIGE OVERHEIDSDAAD*) DALAM  
KONTEKS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN  
TATA USAHA NEGARA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 10 Agustus 2020  
Yang membuat pernyataan,



*Ardoyo*  
Ardoyo Wardhana, S.H  
NIM. 031814153088

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan sebagai tugas akhir untuk melengkapi persyaratan guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulisan Tesis ini dapat terselesaikan hanya karena izin Allah SWT, serta bantuan dari banyak pihak, oleh karena itu perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Prof. Dr, Moh.Nasih,S.E.,M.T.,Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Nurul Barizah, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., MH selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga
4. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar meluangkan waktu yang sangat berharga untuk bimbingan dan arahnya hingga selesainya penulisan Tesis ini.
5. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) I, yang selalu memberikan dukungan, saran dan motivasi dengan segala ketulusan hingga selesainya penulisan Tesis ini.

6. Dr. Suparto Wijoyo,S.H.,M.H selaku Ketua Tim Penguji Tesis dan Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) II yang telah memberikan saran perbaikan pada penyusunan Tesis ini.
7. Dr. M Hadi Subhan,S.H., MH., C.N selaku Anggota Tim Penguji Tesis yang sudah memberikan saran dan masukan pada penyusunan Tesis ini.
8. Dr. Bambang Suheryadi,S.H.,M.Hum selaku Anggota Tim Penguji Tesis yang sudah memberikan saran dan masukan sebagai perbaikan Tesis ini.
9. Ria Setyawati., S.H., M.H., LLM selaku Dosen wali yang telah meluangkan waktu yang berharga memberikan arahan dalam kegiatan akademik.
10. Orang Tua tercinta, Alm. Moeriabrata Martosiswojo, S.H dan Almh. Prof.Dr. Arsiniati M.Brata-Arbai, dr.,SpGK.,DA.,Nutr atas segala kasih sayang dan tauladannya kepada penulis, terkhusus untuk Almh. Mama yang selalu memberikan motivasi dan amanah kepada penulis untuk dapat melanjutkan Studi S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
11. Bapak-ibu mertua, Agus Karijono dan Lily Kurlinah atas perhatian dan doa untuk kami sekeluarga.
12. Isteri Tercinta Lia Kurniasari,S.H dan anak-anakku terkasih Muhammad Javi Moreno, Raissa Fathima Azzahra dan Althaf Aquilani Ramadhan untuk kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
13. Saudara-saudaraku, Ir. Paramita Laksmi Wardhani, Indira Kusuma Wardhani,S.H, Parwita Laksmi Wardhani,S.E.,M.Si untuk dukungan dan motivasinya kepada penulis.

14. Teman-teman Magister Hukum Universitas Airlangga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, khususnya R. Fauzi Zuhri Wahyu Pradika, S.H. sebagai teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan hingga selesainya penulisan Tesis ini ;
15. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang sudah memberikan ilmu dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Semoga semua kebaikan dan ketulusan yang sudah diperbuat mendapat balasan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat dan berguna bagi setiap orang yang membacanya.

Surabaya, 21 Agustus 2020

Ardoyo Wardhana,S.H

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek voor indonesia*)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman  
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh  
Upaya Administrasi.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi  
Perkara dan Persidangan Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung RI 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian  
Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan  
Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan  
(*onrechtmatige overheidsdaad*).



**DAFTAR PUTUSAN**

1. Putusan Mahkamah Agung No. 66 K/Sip/1952.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 838 K/Sip/1970.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 981 K/Sip/1972.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 339 K/Sip/1973.
5. Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.